



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2024– 2026)



**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KATA PENGANTAR

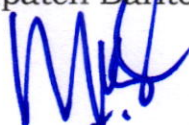
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024-2026 telah diselesaikan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu disesuaikan. Dalam pelaksanaannya review Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan ini khususnya terhadap target-target sasaran program, disesuaikan terhadap review target-target sasaran dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 - 2026 yang memuat visi, misi dan Program Pembangunan Kabupaten Barito Timur dibidang Perikanan dan Peternakan. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di Dinas Perikanan dan Peternakan untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024 - 2026.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor perikanan dan peternakan di Kabupaten Barito Timur

Tamiang Layang, Maret 2023

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Barito Timur,



MISHAEL, S.Pi., SE., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690812 199603 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD.....	9
2.2 Sumberdaya PD.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan PD termasuk capaian SPM sesuai dengan Tupoksinya).....	14
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Permasalahan Pelayanan SKPD (Berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II)	36
3.2 Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	59
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	77
BAB VIII PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Kepegawaian Berdasarkan Kepangkatan dan Jenis Kelamin.....	12
2.2	Kepewaaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
	2.2.1 Sarana dan Prasarana SKPD.....	13
2.4	Alat Angkutan Darat Roda 4	14
2.5	Alat Angkutan Perairan	14
2.6	Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan.....	15
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	21
2.8	Produksi Budidaya Ikan Menurut Kecamatan.....	31
2.9	Jenis dan Populasi Ternak di Kabupaten Barito Timur	31
2.10	Data Statistik Perikanan Budidaya, Tangkap dan Peternakan	32
4.1	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ...	58
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	60
6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	65
7.1	Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan	77

DAFTAR GAMBAR

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2 Sumberdaya Aparatur OPD	12
2.3 Kinerja Pelayanan SOPD	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD ...	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi...	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5 Penentu Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VIII PENUTUP	78

BAB ~ I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama sistem perencanaan di Indonesia adalah sulitnya melakukan penyelarasan dan sinergitas antara program prioritas Nasional dan Daerah. Faktor penyebab antara lain karena dampak ketidakseragaman periodisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Atas dasar permasalahan tersebut terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu amanatnya adalah akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional pada bulan November Tahun 2024.

Menurut pasal 201 ayat 9 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024.

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni banyaknya daerah yang periodisasi Kepala Daerah dan RPJMD-nya yang berakhir sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada Tahun 2024, sehingga akan ada kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah sejak berakhirnya RPJMD Tahun 2023 sampai dengan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Walaupun dalam rentang waktu tersebut akan ada Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri untuk Provinsi, Gubernur untuk Kabupaten/Kota, tetap saja Penjabat Sementara (Pj. Bupati/Walikota) tidak dapat membuat/menyusun arah kebijakan Pembangunan daerah untuk Kabupaten/Kota yang dipimpinnya, sehingga dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman

penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk memerintah Kepala PD untuk menyusun dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026, sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur yang untuk selanjutnya disebut RPD Kabupaten Barito Timur disusun dengan pendekatan teknokratis dengan tetap memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan ini dimaksudkan untuk :

- a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPD Kabupaten Barito Timur dengan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur.
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan Perikanan dan Peternakan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Barito Timur.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024-2026 :

- a. Penyesuaian dengan perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pembangunan daerah Tahun 2024-2026.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Barito Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sistematika penulisan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan Tupoksinya)
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Permasalahan Pelayanan SKPD (berdasarkan capaian kinerja PD pada BAB II).
- 3.2. Isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII. Penutup

BAB ~ II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur berkedudukan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan serta sub urusan Peternakan. Sebagaimana dalam landasan yuridis di tingkat daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur dengan diperjelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur yang secara umum mempunyai tugas penyelenggara pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan serta sub urusan Peternakan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD

- A. **Dinas Perikanan dan Peternakan** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan serta sub urusan peternakan dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan serta sub urusan peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan perikanan dan peternakan
 - b. Perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan perikanan dan peternakan
 - c. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan perikanan dan peternakan
 - d. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perikanan dan peternakan
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya bidang perikanan dan peternakan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT DINAS

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat.

Sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan.

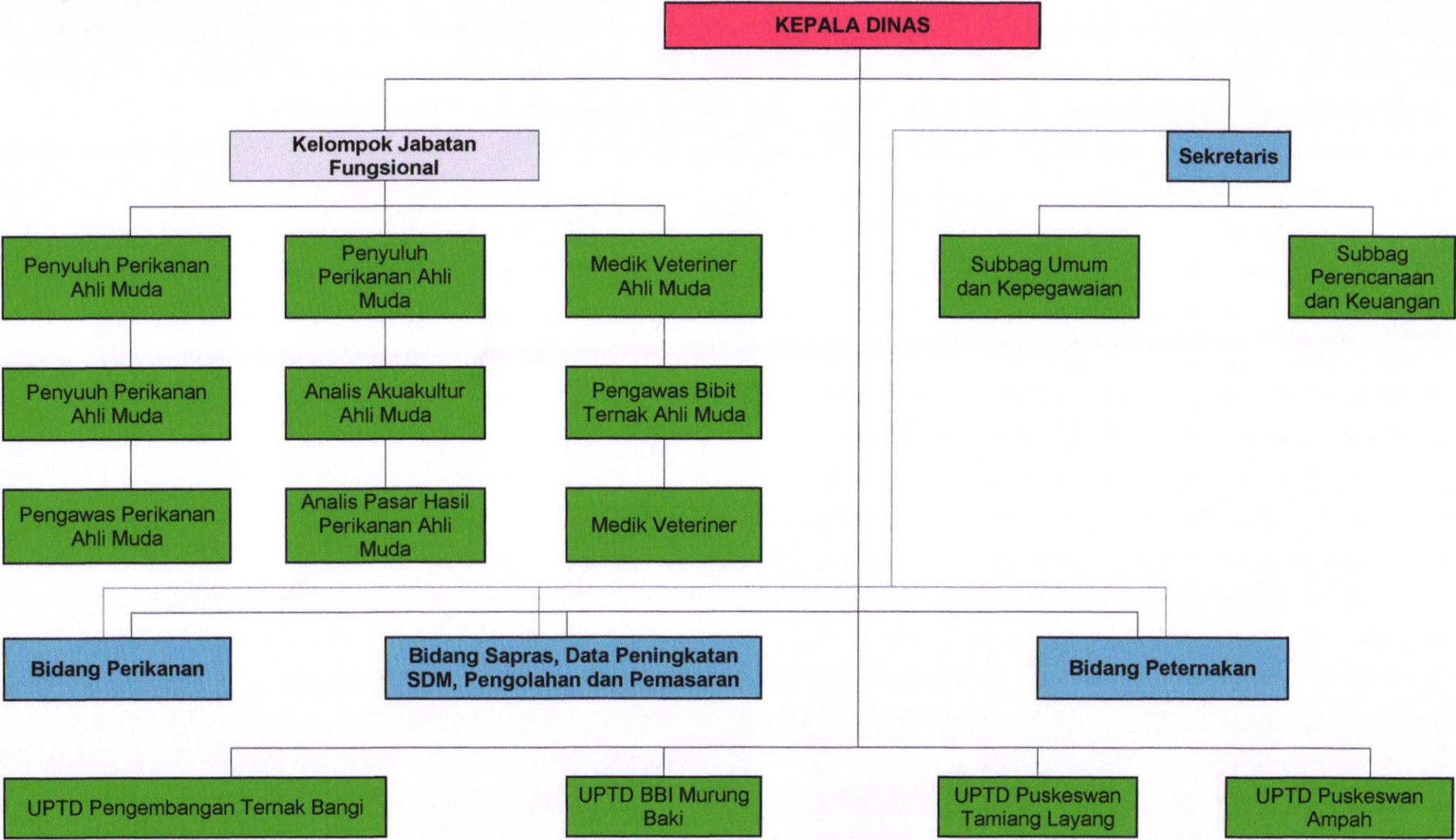
Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan; dan
- d. Pelaksana fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perikanan
4. Bidang Sarana Prasarana, Data, Peningkatan SDM Pengolahan dan Pemasaran Seksi Sarana dan Prasarana
5. Bidang Peternakan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 - a. UPTD Pengembangan Ternak Bangi
 - b. UPTD BBI Murung Baki
 - c. UPTD Puskeswan Tamiang Layang
 - d. UPTD Puskeswan Ampah
7. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Penyuluh Perikanan Ahli Muda
 - b. Analis Akuakultur Ahli Muda
 - c. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda
 - d. Medik Veteriner Ahli Muda
 - e. Medik Veteriner
 - f. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

Gambar 2.1
Struktur Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Barito Timur



2.2. Sumber Daya PD

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi : sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/modal) serta pendapatan asli daerah (PAD). Secara rinci sumber daya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan secara optimal, Pada Tahun 2021 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur didukung oleh 101 (seratus satu) orang pegawai. Secara rinci jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur berdasarkan kepangkatan dan jenis kelamin, berdasarkan kualifikasi pendidikan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Kepegawaian berdasarkan Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No.	Kepangkatan		Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
	Pangkat	Golongan/ Ruang	Laki- laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
3.	Pembina	IV/a	2	2	4
4.	Penata Tingkat I	III/d	9	10	19
5.	Penata	III/c	3	2	5
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	2	2	4
7.	Penata Muda	III/a	3	4	7
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	4	4	8
9.	Pengatur	II/c	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2	-	2
11.	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
12.	Juru Tk. I	I/d	1	-	1
	PHL	-	33	17	50
Jumlah					103

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021

Tabel 2.2 Kepegawaian berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah (orang)
		PNS	Non PNS	
1.	Strata 2 (S – 2)	9	1	10
2.	Strata 1 (S – 1)	24	14	38
3.	Diploma 4 (D – 4)	3	-	3
4.	Diploma 3 (D – 3)	4	3	7
5.	SLTA	12	27	39
6.	SLTP	-	4	4
7.	SD	1	1	2
	J u m l a h	53	50	103

Jika dilihat dari jumlah pegawai terhadap tugas fungsi yang dijalankan dan tingginya intensitas pekerjaan maka dipandang perlu Dinas Perikanan dan Peternakan mengusulkan penambahan pegawai, terutama untuk tenaga medis/paramedic dibidang peternakan dan tenaga administrasi di bagian keuangan dan perencanaan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana SKPD

Dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur memiliki sarana dan prasarana PD untuk menunjang kinerja aparatur dan tenaga teknis dan fungsional.

Sarana dan prasarana/aset-aset yang dikelola sendiri, baik dilihat dari jenis aset, jumlah, kondisi tahun dan nilai perolehan serta letak lokasi ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.3 Data Aset Bangunan Gedung Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Jenis Aset	Jlh.	Kondisi	Tahun	Nilai perolehan	Lokasi
1.	Kantor Dinas	1	Baik	-	APBD	Barito Timur
2.	Kantor UPTD	3	Cukup Baik	-	APBD	Barito Timur
3.	Rumah Dinas	5	Cukup baik	-	APBD	Barito Timur
4	Bangunan pelabuhan	4	3 baik, 1 rusak	-	APBD	Barito Timur
5	Bangunan Pasar	1	rusak	-	APBD	Barito Timur

Tabel 2.4 Alat Angkutan Darat Roda 4

No	Jenis Aset/Merk	Warna/ Nomor Polisi	Kondisi	Tahun Pembelian	Jumlah	Ket
1.	Inova	Hitam	Baik	-	1	APBD
2.	Pick Up Box	Biru	Baik	2008	1	APBD
3	Truck	Putih	Kurang baik	-	1	APBD

Tabel 2.5 Alat Angkutan Perairan

No	Jenis Aset/Merk	Warna/ Nomor Polisi	kondisi	Tahun Pembelian	Nilai Perolehan (Rp)	Ket
1.	Speed Boat	-	Baik	2017	1	APBD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun yang lalu. Dimana sektor Perikanan dan Peternakan tidak sedikit perannya dalam rangka penyediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan lokal maupun nasional. Gambaran kinerja pelayanan urusan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur beserta Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 – 2022 tersebut dapat dilihat pada **tabel 2.6 dan table 2.7 berikut :**

**Tabel. 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Barito Timur
2018-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Urusan Pilihan																			
	Kelautan dan Perikanan																			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Persen	100	100				88,58	91,1				89	91			
1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tahun	1	1				1	1				100	100			
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Tahun	1	1				1	1				100	100			
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tahun	1	1				1	1				100	100			
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Tahun	1	1				1	1				100	100			
5	Penyediaan alat tulis kantor				Tahun	1	1				1	1				100	100			
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Tahun	1	1				1	1				100	100			
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tahun	1	1				1	1				100	100			
8	Penyediaan makanan dan minuman				Tahun	1	1				1	1				100	100			
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Tahun	1	1				1	1				100	100			
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah				Tahun	1	1				1	1				100	100			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persen	95	95				89,67	95,19				94	100			
1	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tahun	1	1				1	1				100	100			
2	Pengadaan Gorden Kantor dan Aula				Tahun	1	1				1	1				100	100			
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Tahun	1	1				1	1				100	100			
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Tahun	1	1				1	1				100	100			
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Tahun	1	1				1	1				100	100			
6	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik				Tahun	1	1				1	1				100	100			
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				Tahun	1	1				1	1				100	100			
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman				Tahun	1	1				1	1				100	100			

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Persen	95	95				1	81,16				1	85			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Tahun	1	1				1	1				100	100			
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				Persen	70	70				1	83,01				1	119			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tahun	1	1				1	1				100	100			
V	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				Persen	50	60				87,8	95,88				176	160			
1	Pengembangan bibit ikan unggul				Tahun	1	1				1	1				100	100			
2	Pembinaan dan pengembangan perikanan				Tahun	1	1				1	1				100	100			
3	Pengembangan Statistik Perikanan				Tahun	1	1				1	1				100	100			
4	Pengawasan Hama dan Penyakit Ikan				Tahun	1	1				1	1				100	100			
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Perikanan(DAK)				Tahun	1	1				1	1				100	100			
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Perikanan(Penunjang DAK)				Tahun	0	1				1	1				#DIV/0!	100			
7	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil				Tahun	1	1				1	1				100	100			
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBIL				Tahun	1	1				1	1				100	100			
9	Gerakan Pakan Mandiri				Tahun	1	1				1	1				100	100			
10	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan (DAK)				Tahun	1	1				1	1				100	100			
11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan (Penunjang DAK)				Tahun	1	1				1	1				100	100			
12	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Budidaya Perikanan				Tahun	0	1				1	1				#DIV/0!	100			
VI	Program pengembangan perikanan tangkap				Persen	50	60				1	87				2	145			
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap				Tahun	1	1				1	1				100	100			
2	Pembinaan Pokwasmas dan Monitoring Perairan Umum				Tahun	1	1				1	1				100	100			
3	Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan/Pasar Ikan di Desa Dayu, Tampulangit, Jurubanu, dan Ketab				Tahun	1	1				1	1				100	100			
4	Pendamping Jaminan Perlindungan Nelayan Perairan Umum Darat				Tahun	1	1				1	1				100	100			
5	Pengembangan Produksi Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum Darat				Tahun	1	1				1	1				100	100			

6	Sosialisasi Pelestarian Sumber Daya Ikan			Tahun	1	1			1	1				100	100			
7	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumber Daya Ikan			Tahun	1	1			1	1				100	100			
8	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil			Tahun	1	1			1	1				100	100			
9	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan			Tahun	1	1			1	1				100	100			
10	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Nelayan (DAK)			Tahun	1	1			1	1				100	100			
11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Nelayan (Penunjang DAK)			Tahun	1	1			1	1				100	100			
VII	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Agribisnis			Unit	5	7			1	1				20	14			
1	Lomba Masak Serba Ikan			Tahun	1	1			1	1				100	100			
2	Pengumpulan Data Statistik dan AKI			Tahun	1	1			1	1				100	100			
3	Sosialisasi Gemar Makan Ikan			Tahun	1	1			1	1				100	100			
VIII	Program Peningkatan Produksi Perikanan			Kg	2409,04	2649,94			1595,12	1940,15				66	73			
1	Perencanaan Pembangunan Perikanan			Tahun	1	1			1	1				100	100			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Point			80	80	80			80	80	80		100	100	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tahun			1	1	1			1	1	1		100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Doku men			100%	2	2			100%	2	2		100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Doku men			100%	5	5			100%	5	5		100	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Doku men			100%	12	12			100%	12	12		100	100	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tahun				1	1				1	1			100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tahun			100%	1	1			100%	1	1		100	100	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Tahun			100%	1	1			100%	1	1		100	100	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Tahun			100%	1	1			100%	1	1		100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Doku men			100%	4	4			100%	4	4		100	100	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tahun				1	1				1	1			100	100

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						100%	101	101				100%	0	0			100	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							1	1					1	1				100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tahun			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Tahun			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan			Tahun			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tahun			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tahun				1	1					1	1				100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tahun			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tahun			97%	1	1				97%	1	1			100	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tahun			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tahun				1	1					1	1				100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Tahun			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Tahun			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Tahun			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			Ton			2037,55 5	2118,64 1	2213,98				2037,56	2118,64 41	2213,98			100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Kegiatan			130,439 Ton	3	3				130,439 Ton	3	3			####	100	100
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			Unit			100%	35	35				100%	35	35			100	100	100
	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			Unit			100%	250	250				100%	250	250			100	100	100
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			Kelompok			100%	1	1				100%	1	1			100	100	100
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			Kelompok			100%	10	10				100%	10	10			100	100	100

Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				Kelompok			100%	10	10			100%	10	10			100	100	100
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							1508,745	1569,095	1639,704			1508,75	1569,095	1639,704			100	100	100
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																			
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				Desa			100%	5	5			100%	5	5			100	100	100
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				Kelompok			-	10	10			-	10	10			####	100	100
Pemberian Pendamping, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				Kelompok			100%	10	10			100%	10	10			100	100	100
Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan																			
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota				Kegiatan			100%	6	6			100%	6	6			100	100	100
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DAK)				Unit			100%	3	3			100%	3	3			100	100	100
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				BBI M.Baki I & II			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100	100	100
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				Kegiatan			100%	1	1			100%	1	1			100	100	100
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				Ha			0	5	5			0	5	5			#DIV/0!	100	100
Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				Penerima			0	100	100			0	100	100			#DIV/0!	100	100
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan							50	55	55			50	55	55			100	100	100
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air				Tahun			1	1	1			1	1	1			100	100	100
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/Kota				Kecamatan			100%	4	4			100%	4	4			100	100	100

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/Kota				Kecamatan		100%	4	4			100%	4	4			100	100	100
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						98	98,9	99,33			98	98,9	99,33			100	100	100
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan				Tahun			1	1				1	1				100	100
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Kecamatan		0	10	10			0	10	10			#DIV/0!	100	100
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				Kegiatan		0	5	5			0	5	5			#DIV/0!	100	100
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Kelompok		100%	10	10			100%	10	10			100	100	100
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Kegiatan		100%	4	4			100%	4	4			100	100	100
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				Ton		810,996	836,705	863,814			810,996	836,705	863,814			100	100	100
				Kg		510.304,79	510.001,74	510.948,18			#####	#####	510.948,18			100	100	100
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																		
Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				Kelompok		100%	10	10			100%	10	10			100	100	100
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				Ekor		100%	400	400			100%	400	400			100	100	100
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						100%	0	0			100%	0	0			100	#DIV/0!	#DIV/0!

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak				Kegiat an			100%	1	1			100%	1	1			100	100	100
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lainnya																			
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi lain				Kel. Tani			100%	80	80			100%	80	80			100	100	100
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							100%	100%	100%			100%	100%	100%			100	100	100
Kegiatan Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				Dosis			100%	6600	7260			100%	6600	7260			100	100	100
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota																			
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				Kegiat an			100%	1	1			100%	1	1			100	100	100
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner							1	1	1			1	1	1			100	100	100
Pendamping Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				Kegiat an			100%	1	1			100%	1	1			100	100	100

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2022**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.204.558.300,00	1.350.672.800	1.138.217.025			1.133.857.740	1.196.379.146	1.036.886.060			94	89	91			1.138.216.925	1.036.885.960
Penyediaan jasa surat menyurat	4.200.000,00	4.800.000	4.920.000			4.200.000	4.238.000	4.320.000			100	88	88			4.919.900	4.319.900
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.405.200,00	107.077.000	112.577.500			69.195.616	82.545.477	99.116.424			91	77	88			112.577.400	99.116.324
Penyediaan jasa administrasi keuangan	723.387.100,00	732.725.000	657.257.400			699.732.000	719.909.000	630.518.600			97	98	96			657.257.300	630.518.500
Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.728.100,00	11.728.100	11.808.100			11.328.000	11.678.000	11.800.000			97	100	100			11.808.000	11.799.900
Penyediaan alat tulis kantor	72.712.900,00	84.760.300	84.860.300			72.660.700	84.654.000	82.599.636			100	100	97			84.860.200	82.599.536
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.968.000,00	11.395.000	5.690.000			8.915.000	11.391.000	5.565.000			99	100	98			5.689.900	5.564.900
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000	10.100.000			7.320.000	5.715.000	5.715.000			49	38	57			10.099.900	5.714.900
Penyediaan makanan dan minuman	175.928.000,00	217.563.000	170.833.000			144.907.000	137.035.300	148.843.400			82	63	87			170.832.900	148.843.300
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.854.000,00	100.049.400	53.435.725			80.274.424	93.433.369	31.979.000			99	93	60			53.435.625	31.978.900
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35.375.000,00	65.575.000	26.735.000			35.325.000	45.780.000	16.429.000			100	70	61			26.734.900	16.428.900
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	158.851.136,00	413.854.633	121.651.902			142.608.900	371.092.350	115.802.893			90	90	95			121.651.802	115.802.793
Pengadaan peralatan gedung kantor	48.178.000,00	23.199.800	30.201.305			44.665.000	22.285.000	30.100.000			93	96	100			30.201.205	30.099.900
Pengadaan Gorden Kantor dan Aula	0,00	25.000.000	-			-	24.998.000	-			#DIV/0!	100	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	15.822.514,00	-	10.136.922			13.686.500	-	10.100.000			87	#DIV/0!	100			10.136.822	10.099.900
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/	79.738.000,00	113.600.000	53.000.000			73.222.400	72.971.850	47.289.610			92	64	89			52.999.900	47.289.510

operasional																	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.130.000,00	13.300.000	16.313.675			10.035.000	13.297.000	16.313.606			99	100	100			16.313.575	16.313.506
Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik	0,00	30.000.000	5.000.000			-	29.895.000	5.000.000			#DIV/0!	100	100			#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	206.254.833	-			-	205.395.500	-			#DIV/0!	100	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman	4.982.622,00	2.500.000	7.000.000			1.000.000	2.250.000	6.999.677			20	90	100			6.999.900	6.999.577
Program peningkatan disiplin aparatur	40.375.000,00	56.925.000	28.681.250			30.517.500	46.200.000	27.335.000			76	81	95			28.681.150	27.334.900
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	40.375.000,00	56.925.000	28.681.250			30.517.500	46.200.000	27.335.000			76	81	95			28.681.150	27.334.900
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.400.000,00	25.690.000	12.252.222			11.395.000	21.325.000	12.070.000			100	83	99			12.252.122	12.069.900
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	11.400.000,00	25.690.000	12.252.222			11.395.000	21.325.000	12.070.000			100	83	99			12.252.122	12.069.900
Program pengembangan budidaya perikanan	1.921.580.000,00	2.626.330.888	3.335.401.946			1.676.975.456	2.306.002.789	3.198.094.843			87	88	96			3.335.401.846	3.198.094.743
Pengembangan bibit ikan unggul	144.023.900,00	314.824.290	403.004.507			143.835.400	309.809.800	400.040.600			100	98	99			403.004.407	400.040.500
Pembinaan dan pengembangan perikanan	385.191.000,00	1.689.593.000	452.506.639			384.710.500	1.406.311.853	442.195.972			100	83	98			452.506.539	442.195.872
Pengembangan statistik perikanan	32.161.100,00	35.377.210	33.510.000			31.971.100	35.342.210	19.780.000			99	100	59			33.509.900	19.779.900
Pengawasan hama dan penyakit ikan	19.010.000,00	25.727.500	-			18.656.000	23.977.500	-			98	93	#DIV/0!			-100	-100
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Perikanan (DAK)	1.187.780.000,00	-	-			945.519.402	-	-			80	#DIV/0!	#DIV/0!			-100	-100
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Perikanan (Penunjang DAK)	153.414.000,00	-	100.592.800			152.283.054	-	89.110.500			99	#DIV/0!	89			100.592.700	89.110.400
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil	0,00	147.155.000	12.700.000			-	145.566.000	-			#DIV/0!	99	0			#DIV/0!	#DIV/0!

Peningkatan Sarana dan Prasarana BBIL Netampin	0,00	186.880.000	23.160.000			-	163.975.426	8.976.248			#DIV /0!	88	39			#DIV /0!	#DIV /0!
Gerakan Pakan Mandiri	0,00	26.625.000	-			-	26.495.000	-			#DIV /0!	100	#DIV /0!			#DIV /0!	#DIV /0!
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan (DAK)	0,00	176.000.000	-			-	175.080.000	-			#DIV /0!	99	#DIV /0!			#DIV /0!	#DIV /0!
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Perikanan (Penunjang DAK)	0,00	24.148.888	-			-	19.445.000	-			#DIV /0!	81	#DIV /0!			#DIV /0!	#DIV /0!
Peningkatan Kapasita Pelaku Usaha Budidaya Perikanan	0,00	-	-			-	-	-			#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!			#DIV /0!	#DIV /0!
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Perikanan (DAK Penugasan Cadangan)	0,00	-	1.005.928.000			-	-	956.141.523			#DIV /0!	#DIV /0!	95			#DIV /0!	#DIV /0!
Bantuan Pemeliharaan Ikan Dalam Tong untuk Masyarakat terdampak Covid-19	0,00	-	1.206.000.000			-	-	1.183.850.000			#DIV /0!	#DIV /0!	98			#DIV /0!	#DIV /0!
Pelatihan Singkat Untuk Calon Penerima Bantuan Pemeliharaan Ikan Dalam Tong	0,00	-	98.000.000			-	-	98.000.000			#DIV /0!	#DIV /0!	100			#DIV /0!	#DIV /0!
Program pengembangan perikanan tangkap	409.788.800,10	1.767.150.700	654.205.196			391.846.100	1.510.935.000	569.986.050			96	86	87			654.205.096	569.985.950
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	99.075.000,00	135.799.585	48.145.000			81.629.000	94.500.000	22.245.000			82	70	46			48.144.900	22.244.900
Pembinaan pokwasmas dan monitoring perairan umum	10.785.000,00	154.951.000	118.221.549			10.785.000	154.526.000	96.999.250			100	100	82			118.221.449	96.999.150
Pembinaan dan pengembangan pelabuhan/pasar ikan di desa dayu, tampulangit, juru banu dan ketab	27.340.600,00	47.310.000	27.830.000			27.340.600	46.620.000	13.317.000			100	99	48			27.829.900	13.316.900
Pendamping Jaminan Perlindungan Nelayan Perairan Umum Darat	88.240.000,00	145.760.000	8.850.000			88.045.000	69.170.000	8.850.000			100	47	100			8.849.900	8.849.900
Pengembangan produksi usaha penangkapan ikan di perairan umum darat	162.723.200,10	145.260.200	215.908.549			162.501.500	136.090.000	200.948.000			100	94	93			215.908.449	200.947.900

Sosialisasi Pelestarian Sumber Daya Ikan	21.625.000,00	28.795.915	-			21.545.000	28.790.000	-			100	100	#DIV/0!			-100	-100
Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumber Daya Ikan	0,00	68.805.000	-			-	4.250.000	-			#DIV/0!	6	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil	0,00	62.040.000	22.949.549			-	57.544.000	16.216.000			#DIV/0!	93	71			#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan	0,00	65.000.000	16.300.549			-	60.825.000	15.800.000			#DIV/0!	94	97			#DIV/0!	#DIV/0!
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Nelayan (DAK)	0,00	803.949.000	-			-	799.450.000	-			#DIV/0!	99	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Nelayan (Penunjang DAK)	0,00	109.480.000	-			-	59.170.000	-			#DIV/0!	54	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan	0,00	-	196.000.000			-	-	195.610.800			#DIV/0!	#DIV/0!	100			#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Agribisnis	138.277.900,00	208.325.000	46.980.433			136.789.500	169.545.000	29.581.500			99	81	63			46.980.333	29.581.400
Lomba Masak serba Ikan	98.642.900,00	123.992.900	-			98.394.500	110.462.000	-			100	89	#DIV/0!			-100	-100
Pengumpulan data statistik dan AKI	39.635.000,00	74.332.100	38.013.766			38.395.000	59.083.000	29.581.500			97	79	78			38.013.666	29.581.400
Sosialisasi Gemar Makan Ikan	0,00	10.000.000	8.966.667			-	-	-			#DIV/0!	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Produksi Perikanan	27.855.000,00	67.640.000	60.230.000			24.653.000	35.980.000	28.550.000			89	53	47			60.229.900	28.549.900
Perencanaan Pembangunan Perikanan	27.855.000,00	67.640.000	60.230.000			24.653.000	35.980.000	28.550.000			89	53	47			60.229.900	28.549.900
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				83.999.000	145.288.390				76.623.000	227.653.845				91	157	145.288.290	227.653.745
Penyusunan Dokumen Perencanaan				33.342.000	66.929.720				33.342.000	206.953.845				100	309	66.929.620	206.953.745

Perangkat Daerah																	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				44.817.000	67.658.890			37.529.000	20.700.000					84	31	67.658.790	20.699.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.840.000	10.699.780			5.752.000	-					98	0	10.699.680	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.935.068.093	5.337.033.100			4.030.204.606	4.099.735.300					102	77	5.337.033.000	4.099.735.200
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.789.430.093	3.905.335.300			2.898.345.606	3.905.335.300					104	100	3.905.335.200	3.905.335.200
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.145.638.000	1.431.697.800			1.131.859.000	194.400.000					99	14	1.431.697.700	194.399.900
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.630.000	75.596.125			5.049.495	-					66	0	75.596.025	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				7.630.000	75.596.125			5.049.495	-					66	0	75.596.025	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				455.716.985	647.748.547			455.329.708	573.119.246					100	88	647.748.447	573.119.146
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				231.887.985	352.403.827			258.950.502	139.500.372					112	40	352.403.727	139.500.272
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-	-			-	41.580.300					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				108.194.400	124.512.960			108.933.154	79.006.700					101	63	124.512.860	79.006.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan				15.150.000	16.665.000			14.000.000	14.400.000					92	86	16.664.900	14.399.900
Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	-			-	50.050.000					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.484.600	154.166.760			73.446.052	248.581.874					73	161	154.166.660	248.581.774
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				496.254.700	671.312.497			386.994.832	893.310.838					78	133	671.312.397	893.310.738
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.995.000	5.494.500			12.010.000	14.994.000					240	273	5.494.400	14.993.900

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				192.849.000	212.133.900				92.930.232	98.316.838				48	46	212.133.800	98.316.738
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				298.410.700	453.684.097				282.054.600	780.000.000				95	172	453.683.997	779.999.900
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				225.141.778	284.671.844				155.076.100	149.801.822				69	53	284.671.744	149.801.722
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				148.651.778	200.532.844				85.175.200	55.770.092				57	28	200.532.744	55.769.992
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.150.000	22.165.000				14.107.400	34.656.432				70	156	22.164.900	34.656.332
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				56.340.000	61.974.000				55.793.500	59.375.298				99	96	61.973.900	59.375.198
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				364.100.705	559.000.000				348.047.000	19.972.000				96	4	558.999.900	19.971.900
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				20.814.705	50.000.000				20.288.000	19.972.000				97	40	49.999.900	19.971.900
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				324.000.000	324.000.000				323.169.000	-				100	0	323.999.900	- 100
Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				19.286.000	185.000.000				4.590.000	-				24	0	184.999.900	- 100
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				94.373.800	341.788.420				19.747.800	31.915.000				21	9	341.788.320	31.914.900
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				12.256.000	60.000.000				8.678.000	31.915.000				71	53	59.999.900	31.914.900

Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				53.999.800	114.381.180				3.999.800	-				7	0	114.381.080	- 100
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				28.118.000	167.407.240				7.070.000	-				25	0	167.407.140	- 100
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				-	-				-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				436.105.150	581.788.420				338.679.000	47.734.700				78	8	581.788.320	47.734.600
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				178.679.000	300.000.000				174.669.000	47.734.700				98	16	299.999.900	47.734.600
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				-	114.381.180				-	-				#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemberian Pendamping, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				257.426.150	167.407.240				164.010.000	-				64	0	167.407.140	- 100
Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan				1.208.393.730	1.628.336.951				1.120.875.498	492.024.641				93	30	1.628.336.851	492.024.541
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota				58.009.600	121.952.871				61.811.400	149.370.170				107	122	121.952.771	149.370.070
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DAK)				722.855.285	722.855.285				609.770.618	-				84	0	722.855.185	- 100
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				354.997.790	395.997.790				351.873.480	287.088.971				99	72	395.997.690	287.088.871
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				72.531.055	107.531.005				97.420.000	55.565.500				134	52	107.530.905	55.565.400

Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				-	20.000.000				-	-				#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				-	260.000.000				-	-				#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air				512.676.905	565.600.200				451.553.550	177.449.000				88	31	565.600.100	177.448.900
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/Kota				188.123.965	212.000.000				164.064.400	27.360.000				87	13	211.999.900	27.359.900
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/Kota				324.552.940	353.600.200				287.489.150	150.089.000				89	42	353.600.100	150.088.900
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan				-	35.000.000				-	-				#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	35.000.000				-	-				#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				-	225.000.000				141.231.450	175.509.893				#DIV /0!	78	#DIV/0!	175.509.793
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				-	225.000.000				141.231.450	175.509.893				#DIV /0!	78	#DIV/0!	175.509.793
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				230.643.710	275.000.000				162.839.300	29.955.900				71	11	274.999.900	29.955.800
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				73.999.810	75.000.000				65.625.200	-				89	0	74.999.900	- 100
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				156.643.900	200.000.000				97.214.100	29.955.900				62	15	199.999.900	29.955.800
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian														#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				144.055.400	182.267.360				164.232.400	208.763.660				114	115	182.267.260	208.763.560
Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				144.055.400	182.267.360				164.232.400	208.763.660				114	115	182.267.260	208.763.560
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				272.617.225	503.646.110				237.003.070	65.134.527				87	13	503.646.010	65.134.427
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				202.070.475	503.646.110				166.478.370	65.134.527				82	13	503.646.010	65.134.427
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				70.546.750	-				70.524.700	-				100	#DIV /0!	- 100	- 100

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				94.041.250	156.553.375				84.964.950	73.485.250				90	47	156.553.275	73.485.150
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak				94.041.250	156.553.375				84.964.950	73.485.250				90	47	156.553.275	73.485.150
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lainnya				2.005.835.100	2.062.545.610				1.856.786.400	65.474.000				93	3	2.062.545.510	65.473.900
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain				2.005.835.100	2.062.545.610				1.856.786.400	65.474.000				93	3	2.062.545.510	65.473.900
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																	
Kegiatan Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota				222.530.000	272.633.020				221.469.200	289.417.704				100	106	272.632.920	289.417.604
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				222.530.000	272.633.020				221.469.200	289.417.704				100	106	272.632.920	289.417.604
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				121.526.474	137.952.181				120.967.550	81.107.674				100	59	137.952.081	81.107.574
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan teknis untuk Pemasukan				121.526.474	137.952.181				120.967.550	81.107.674				100	59	137.952.081	81.107.574

dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan																	
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner				101.018.600	139.875.560				58.096.337	25.780.000				58	18	139.875.460	25.779.900
Pendamping Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				101.018.600	139.875.560				58.096.337	25.780.000				58	18	139.875.460	25.779.900

Indikator makro kinerja pelayanan SKPD hasil pembangunan perikanan selama 5 tahun terakhir (2018– 2022), yaitu :

1. PDRB Sektor Perikanan dan Peternakan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi bukan hanya untuk PDRB kelompok Perikanan dan Peternakan secara umum, tetapi juga pada PDRB propinsi. Perkembangan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana tersebut pada tabel 1 dan 2 berikut:

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(persen %)

Lapangan Usaha	2018	2019*)	2020**)	Penurunan rata-rata 2018-2020
%PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap - Pendapatan Daerah	17,34	17,28	19,67	

(*Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara)

(Miliyar rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019*)	2020**)	Kenaikan rata-rata 2018-2020
%PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap - Pendapatan Daerah	1.221,52	1.304,64	1.397,25	

Sumber : BPS, 2020

(*Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara)

2. Produksi Perikanan dan Peternakan

Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Timur berasal dari hasil perikanan darat yang dibedakan menjadi perikanan umum dan budidaya. Tahun 2019 produksi perikanan budidaya secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 1.308.150 kg. Kecamatan dengan produksi tertinggi adalah Kecamatan Karusen Janang.

Potensi Peternakan di Kabupaten Barito Timur antara lain ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Populasi ternak besar (sapi potong dan kerbau) pada tahun 2019 berjumlah 2.484 ekor yang didominasi jenis sapi potong sebesar 1.563 ekor, sedangkan untuk ternak kerbau sebanyak 921 ekor. Populasi ternak kecil (kambing dan babi) pada tahun yang sama berjumlah 38.578 ekor yang didominasi ternak babi sebanyak 37.700 ekor dan sisanya berupa ternak kambing sebanyak 878 ekor. Untuk lebih jelas data produksi ikan dan ternak dapat dilihat pada tabel 2.8 dan 2.9 berikut :

Tabel 2.8
Produksi Budidaya Ikan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019

No	Kecamatan	Budidaya Air Tawar (kg)		Jumlah (Kg)
		Kolam	Karamba	
1	Banua Lima	2.300	-	2.300
2	Dusun Timur	136.000	57.000	193.000
3	Paju Epat	23.000	217.000	240.000
4	Awang	15.000	-	15.000
5	Patangkep Tutui	8.000	-	8.000
6	Dusun Tengah	143.580	12.000	155.580
7	Raren Batuah	145.000	-	145.000
8	Paku	51.000	75.000	126.000
9	Karusen Janang	43.000	14.000	57.000
10	Pematang Karau	160.000	160.000	320.000
Total		726.880	535.000	1.261.880

Sumber : Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.9
Jenis dan Populasi Ternak di Kabupaten Barito Timur

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi
1	Banua Lima	97	-	28	1.784
2	Dusun Timur	278	413	16	14.409
3	Paju Epat	129	508	104	1.686
4	Awang	7	-	7	3.792
5	Patangkep Tutui	52	-	12	1.342
6	Dusun Tengah	273	-	167	7.869
7	Raren Batuah	308	-	145	401
8	Paku	121	-	231	4.212
9	Karusen Janang	59	-	8	1.656
10	Pematang Karau	228	-	160	489
Total		1.552	921	878	37.640

Sumber : Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.10
Data Statistik Perikanan Budidaya, Tangkap dan Peternakan Tahun 2020 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Taget	Realisasi	Taget	Realisasi	Taget	Realisasi
1	Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Babi, Ayam Kampung, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Itik)	0	795,083	810,996	684,415	836,709	600,836
2	Produksi Perikanan Tangkap	1.047,16	1.940,15	2.037,155	1.595,11	2.118,641	1.531,635
3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	799,03	1.436,88	1508,745	1.390,88	1.569,095	1.803,737
4	RTP Pembudidaya Ikan (kolam + keramba)	1.350	1.363				1.589
5	RTP Nelayan (sungai, danau, rawa)	3.930	1.310				1.310
6	Luas Areal (Ha) Budidaya						
	- Kolam	37,2	37,2	36,5	36,6		378.012
	- Keramba	13,75	13.70	13,7	14,2		137.145
7	Nilai Produksi Budidaya (Rp. 1.000)	15.980.520	28.737.600	29.088.025	29.147.312		
8	Nilai Produksi Tangkap (Rp. 1.000)	36.650.460	67.905.180	25.140.142	29.175.481		

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Perikanan Kab. Barito Timur

3. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sejak tahun 2014 telah dilakukan pengawasan di perairan umum. Secara umum perairan perikanan di Kabupaten Barito Timur tergolong aman hanya ada pelanggaran perikanan sebanyak 2 (dua) kasus pada tahun 2016 dan 2017 yang ditangani langsung oleh Tim Pengawasan Dinas Perikanan dan Peternakan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Barito Timur dan Tim POKMASWAS. Hasil penanganan dari kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Barito Timur dengan POKMASWAS sudah bisa diatasi dengan cara damai dan sosialisasi.

4. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan

Pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dan dilaksanakan melalui bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Pengembangan SDM perikanan diselenggarakan dalam bentuk pelatihan bagi masyarakat (non aparatur) dan aparatur (daerah). Pelatihan bagi masyarakat ditujukan untuk nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, pedagang ikan dan masyarakat perikanan yang meliputi teknik penangkapan ikan, pelatihan pengolahan dan mutu, serta pemasaran dan manajemen usaha. Sedangkan pelatihan bagi aparatur antara lain pelatihan teknis aparatur, pelatihan struktural aparatur, dan pelatihan prajabatan.

Pengembangan SDM perikanan melalui bidang penyuluhan diarahkan pengembangan keahlian dan keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan, serta meningkatkan citra penyuluhan. Jumlah penyuluh perikanan di Kabupaten Barito Timur sebanyak 13 orang tersebar di 10 kecamatan.

2.4. Kelompok Sarana Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah masyarakat pelaku usaha sub sektor perikanan yang meliputi kelompok usaha pembudidaya ikan, nelayan tangkap dan pengolah hasil perikanan, masyarakat pelaku usaha sub sektor peternakan komoditi sapi, babi, kambing, kerbau, itik, ayam ras dan ayam buras serta masyarakat penerima manfaat hasil peternakan.

Adapun tantangan dan peluang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur sesuai dengan perubahan dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- Tantangan kedepan yang harus dihadapi adalah tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan yakni bagaimana meningkatkan daya saing komoditas perikanan dan peternakan dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen. Daya saing harus lebih ditingkatkan terutama pengembangan produk olahan. Selain itu pengembangan komoditas dan produk baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi juga harus dirintis.
- Kurangnya minat pemuda terhadap usaha perikanan dan peternakan. Kebanyakan pemuda lebih memilih menjadi karyawan swasta/perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan

perkebunan. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagaimana memberikan kesempatan lebih luas kepada kelompok pemuda untuk dapat beraktivitas bidang perikanan dan peternakan.

- Mengembangkan akses pembudidaya ikan/nelayan dan peternak terhadap sumber permodalan. Lembaga perbankan formal kebanyakan berada di kota. Sementara menunggu keberpihakan lembaga perbankan formal terhadap perikanan dan peternakan, maka pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan perlu dilakukan, tetapi lembaga keuangan mikro ini membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen kepada kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis.
- Jumlah penduduk yang semakin meningkat juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana agar meningkatkan produksi perikanan budidaya, tangkap dan peternakan serta meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, perikanan tangkap dan peternakan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi ikan, hasil ternak yang semakin meningkat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perairan. Untuk menjaga kelestarian sumber daya perairan ini dibutuhkan kerjasama pemerintah, masyarakat (pokmaswas) dan instansi terkait seperti kepolisian. Hal ini penting dilakukan agar populasi ikan di perairan umum tidak mengalami penurunan jumlah populasi.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan mandat otonomi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan (eksplorasi, eksploitasi dan konservasi) sumberdaya wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut oleh daerah provinsi, dan sejauh sepertiga dari wilayah laut Daerah Propinsi adalah wilayah Daerah Kabupaten/Kota.
- Terbentuknya Departemen Kelautan Dan Perikanan RI (2001) dan kelembagaan perikanan di daerah sesuai dengan otonomi daerah (UU Nomor 32/2004) akan menciptakan program perikanan yang bersinergis antara pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan konsumsi ikan dan konsumsi daging/telur menyebabkan permintaan pasar terhadap ikan dan hasil ternak juga semakin meningkat.
- Kebijakan pembangunan perikanan mengupayakan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal untuk meningkatkan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan guna menyediakan ikan untuk konsumsi dan bahan baku industri. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya perikanan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

BAB ~ III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa diharapkan di masa mendatang dengan kondisi saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan harus dilihat dari aspek makro serta aspek yang muncul dan terbatas pada internal Kabupaten Barito Timur walaupun secara langsung dan tidak langsung, permasalahan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Karena setiap daerah merupakan wilayah yang terbuka dan sangat bergantung dengan wilayah yang lebih luas dan menjadi induknya. Pembahasan permasalahan pembangunan dalam dokumen ini dimulai dari permasalahan makro yang berkaitan dengan kondisi nasional, regional serta sektoral yang secara langsung saling berkaitan dan dilanjutkan dengan permasalahan menurut urusan pemerintahan.

Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Selain itu, permasalahan pembangunan bisa dilihat dari hasil pengendalian dan evaluasi hasil kinerja pembangunan periode lalu untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Pembangunan daerah di segala bidang merupakan proses menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Namun seringkali hasil dari pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kehidupan antar individu semakin terasa. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini,” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Indeks Gini yang menyatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang, maka dapat disimpulkan masih terdapat pendapatan penduduk yang tidak merata. Permasalahan utama Kabupaten Barito Timur adalah “Belum meratanya kesejahteraan masyarakat Barito Timur”. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh fokus permasalahan ke dalam permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

1. Fokus Permasalahan Perekonomian Daerah: *Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat.*

Perekonomian memegang peran yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, sebab ekonomi yang kuat akan bermuara pada masyarakat yang sejahtera. Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Dimana Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis kerakyatan belum berkembang secara optimal dan belum meratanya pendapatan masyarakat.

3.1 Permasalahan Pelayanan SKPD (berdasarkan capaian kinerja PD pada BAB II)

Sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) yang menjadi unggulan dan sumber pendapatan tertinggi di Kabupaten Barito Timur ini belum berkembang secara maksimal, sementara sektor pertanian merupakan sektor ekonomi kerakyatan. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang mumpuni, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sistem ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau disebut dengan perekonomian kerakyatan. Konsep perekonomian ini adalah mengelola secara swadaya sumber daya ekonomi yang diusahakan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir serta mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai tupoksi dinas, maka permasalahan Dinas Perikanan dan Peternakan adalah **“masih rendahnya produktivitas sector perikanan, produktivitas sector peternakan”** yang ditandai :

1. Masih rendahnya tingkat produksi perikanan dan peternakan;
2. Masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan dan peternakan;
3. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat, petani/peternak, pembudidaya dan nelayan.

Dari permasalahan diatas, Dinas Perikanan dan Peternakan berupaya menjalankan program kegiatan untuk meningkatkan perekonomian petani/peternak, pembudidaya dan nelayan selama periode renstra 2024-2026.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dalam RPD Kabupaten Barito Timur adalah Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan. Sementara isu strategis Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha Perikanan (Tangkap/Budidaya) dan Pelaku Usaha Peternakan.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 5 prioritas nasional yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

1. Prioritas ke-1 : **Mengoptimalkan dan memperkuat Industrialisasi perikanan budidaya** untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat, yang implementasinya dengan akselerasi peningkatan produksi aquaculture/perikanan budidaya, Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng, Pengembangan komoditas budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting, Pengembangan pakan ikan mandiri, Pengembangan system pembenihan ikan nasional, Pengembangan kawasan kluster usahabudidaya ikan yang berkelanjutan, Pengembangan system kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya, Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya, Pembangunan dan pengutan infrastruktur perikanan budidaya air payau, tawar dan laut, Peningkatan kerjasama dan sinergitas kebijakan, program, anggaran dan data perikanan budidaya antara pusat, daerah dan lintas sektoral, Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan, Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan, pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu, Penguatan unit pelaksana teknis perikanan budidaya.
2. Prioritas ke-2 : **Memperbaiki komunikasi dengan nelayan**, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan, yang dalam implementasinya akan dilaksanakan dengan membuka komunikasi dengan stakeholders, optimalisasi pengelolaan sumberdaya ikan berbasis WPPNRI termasuk optimalisasi lembaganya, Penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stock sumberdaya ikan, Perbaikan, penataan dan penyederhanaan perizinan, Penguatan UPT Teknis Perikanan Tangkap.
3. Prioritas ke-3 : **Membangkit Industri Kelautan Perikanan** melalui kebutuhan bahan baku industry, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautanan., yang implementasinya dalam hal perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industry pengolahan ikan/udang dan rumput laut
4. Prioritas ke-4 : **Pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil penguatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan karantina ikan** melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Prioritas ke-5 : **Penguatan SDM dan Inovasi riset** kelautan dan Perikanan.

Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) **ekonomi**, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi kelautan dan perikanan pada PDB nasional, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) **sosial**, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/ minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di

masyarakat; dan (3) **lingkungan hidup**, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah:

1. *Pro poor*

Pendekatan *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. *Pro job*

Pendekatan *Pro-job* dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

3. *Pro growth*

Pendekatan *pro-growth* dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

4. *Pro sustainability*

Pendekatan *pro-sustainability* dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas dilakukan melalui:

1. *Pengembangan Minapolitan*

Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengembangan minapolitan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah.

Pendekatan pengembangan minapolitan dilakukan melalui:

a. *Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Wilayah*

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, **mencegah** penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus

mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan.

b. Kawasan Ekonomi Unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

c. Sentra Produksi

Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.

d. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

e. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

f. Lintas Sektor

Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasara produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan Minapolitan al. :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti (i) pembangunan lanjutan dermaga PPI, (ii) pengembangan kapal dan alat penangkapan ikan sebesar 200 unit, (iii) pengembangan kawasan budidaya di 5 kawasan yang terdiri dari 2 kawasan budidaya perikanan payau, 2 kawasan budidaya perikanan tawar dan 1 kawasan budidaya perikanan laut, (iv) memenuhi kebutuhan benih ikan dan udang yang mencapai sekitar 15 ribu ekor benih udang dan 20 ribu benih ikan unggul (Patin, mas dan nila), (v) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (seperti; pengembangan sistem rantai dingin (*cold chain system*), sentra pengolahan, klaster/ minapolitan industri hasil perikanan dan pasar ikan) di 14 kecamatan;
- b. Pengembangan ekspor melalui pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi ekspor sebanyak 12 UKM berpotensi ekspor sampai dengan tahun 2015;
- c. Mendorong peningkatan nilai investasi perikanan mencapai Rp200 milyar;
- d. Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang mampu menjangkau 20 buah usaha kecil dan menengah di 14 kecamatan;

- e. Pembangunan prasarana pulau-pulau kecil di 20 pulau, khususnya di pulau-pulau kecil terpencil
- g. Peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan mencapai: (i) usaha di perikanan tangkap mencakup 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB), (ii) usaha di pengolahan dan pemasaran: 30 Unit Pengolahan Ikan (UPI)

2. *Peningkatan skala usaha*

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (*entrepreneurship*) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (*trust building*) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa *entrepreneurship* para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi *entrepreneurship* akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam berproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas.

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, swasta maupun dari pemerintah melalui dana APBN. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda, KKP memiliki UPT yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan teknis/magang budidaya perikanan, penangkapan, dan pengolahan.

3. *Networking (Jejaring kerja)*

Setiap individu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

KKP akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan memfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan networking, baik secara internal antar eselon I di lingkup KKP, antara pusat-daerah, antar daerah, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama internasional (bilateral, multilateral, dan regional).

Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga

terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.

4. *Technology and Innovation*

KKP akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk bertanggung menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan jawab.

5. *Pemberdayaan Masyarakat*

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (i) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen KKP dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumber daya ikan, pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan (i) identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaannya berbasis desa (ii) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat, (iii) meningkatkan kapasitas aparatur sebagai pengelola di wilayahnya, (iv) memperbaiki kualitas masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan

kapasitas usaha, (v) memanfaatkan secara optimal kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru, (vi) mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi, serta (vii) menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola *bottom up* sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.

6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi.

Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan kebijakan tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan dalam 5 tahun ke depan menjadi bagian dari pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan diarahkan pada pencapaian dua prioritas bidang, yakni (i) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Perikanan dan Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, serta (ii) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Untuk mendukung prioritas bidang tersebut, maka kontribusi pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi Pertanian, perikanan dan kehutanan, maka KKP akan meningkatnya ketersediaan bahan pangan dalam negeri, termasuk ketersediaan ikan untuk konsumsi masyarakat dari 30,47 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 menjadi 38,67 kg/kapita/tahun pada tahun 2014, dengan sasaran produksi perikanan dari 10,76 juta ton pada tahun 2010 menjadi 22,39 juta ton pada tahun 2014.

Disamping itu, KKP akan mendorong peningkatan kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas dari 3,0% pada tahun 2010 menjadi 6,5% pada tahun 2014, meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari US\$2,9 miliar pada tahun 2010 menjadi US\$5,0 miliar pada tahun 2014, dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan dari 105 pada tahun 2010 menjadi 1115 pada tahun 2014.

Fokus prioritas yang terkait adalah (1) peningkatan produksi dan produktivitas untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri, (2) peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perikanan, dan (3) peningkatan kapasitas masyarakat perikanan.

2. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kontribusi KKP dalam peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah wilayah periaran Indonesia yang bebas *Illegal, Unreported & Unregulated* (IUU) *Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan dari 34% pada tahun 2010 menjadi 89% pada tahun 2014, mewujudkan pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar sebanyak 200 pulau pada tahun 2014, mewujudkan upaya rehabilitasi dan konservasi laut dan perairan dari 13,5 juta ha pada tahun 2010 menjadi 15 juta ha pada tahun 2014, mewujudkan kerjasama internasional dan antar daerah, dan meningkatkan riset dan iptek kelautan.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Arah Kebijakan Kementerian Pertanian memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- 1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- 3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- 4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
- 5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

C. Dukungan Lintas Sektor

Pembangunan kelautan dan perikanan secara utuh memerlukan dukungan instansi terkait serta peran serta masyarakat luas. Adapun beberapa bentuk dukungan kegiatan yang diperlukan dari instansi lain sebagaimana tersebut pada tabel 16 berikut:

No	Bidang	Kegiatan
1.	IPTEK	Penelitian teknologi perikanan baik budidaya, tangkap maupun pengolahan hasil perikanan
2.	Sarana dan Prasarana	a. Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbaharukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi; dan b. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih, dan jalan lingkungan
4.	Keamanan	a. Peningkatan operasi bersama keamanan kawasan perairan umum; b. Peningkatan koordinasi pengawasan keamanan

		kawasan perairan umum dan kawasan budidaya
5.	Wilayah dan Tata Ruang	c. Pembinaan kepolisian kepada masyarakat. a. Pemetaan dasar perairan umum; dan b. Peningkatan ketersediaan data dan informasi survey sumber daya perairan
6.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	a. Pengelolaan sumber daya ikan (SDI).

Dari hasil telaahan capaian kinerja Renstra tahun yang lalu masih ada beberapa faktor **penghambat** yang mempengaruhi pelayanan, yaitu

1. Masih lemahnya kelembagaan dan permodalan usaha perikanan dan peternakan dalam arti luas.
2. Masih lemahnya kapasitas SDM di bidang Perikanan dan Peternakan dalam usaha untuk peningkatan produktivitas perikanan.
3. Belum optimalnya nilai tambah hasil perikanan dan peternakan

Beberapa faktor – faktor **pendorong** yang mempengaruhi pelayanan, yaitu :

1. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil – hasil produksi perikanan dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk
2. Permintaan produk perikanan dan peternakan yang semakin meningkat akibat adanya trend *“gaya hidup sehat dengan gemar makan ikan (Gemarikan)”* dan *“produk perikanan yang aman, sehat, utuh, dan handal (ASUH)”*.
3. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan peternakan
4. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerjasama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan perikanan dan peternakan.
5. Produksi dan produktivitas perikanan dan peternakan masih dapat ditingkatkan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barito Timur telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2014 - 2023. Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur mencakup:

- a. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Berdasarkan RTRW, bahwa banyak peluang bagi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui sektor Perikanan dan Peternakan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Barito Timur, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting,

karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Timur, maka dapat dirumuskan maka **Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026** sebagai berikut:

1. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar;
4. Pengentasan Kemiskinan;
5. Reformasi Birokrasi;
6. Pelestarian Lingkungan Hidup;
7. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal daerah

Berdasarkan RTRW, bahwa banyak peluang bagi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui sektor Perikanan dan Peternakan.

3.5 Penentuan isu –isu Strategis

a. Masalah internal perikanan tangkap:

- Terjadinya penangkapan ikan secara illegal fishing
- Pengembangan perikanan tangkap belum optimal
- Memungkinkan kerusakan ekosistem kawasan perairan umum darat
- Belum optimalnya pengelolaan perairan umum
- Belum optimalnya pengelolaan potensi perairan umum darat

b. Masalah eksternal

- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya perikanan bagi pembangunan ekonomi daerah, sehingga perhatian, pengetahuan (wawasan) dan penguasaan serta penerapan IPTEK perikanan juga menjadi rendah.
- Belum adanya dukungan permodalan yang memadai
- Tata ruang dan pengendalian pencemaran belum kondusif

d. Permasalahan Penangkapan Ikan diperairan Umum.

- Potensi Perairan Umum didaerah ini tersebar sehingga perlu adanya survey potensi perikanan perairan umum
- Masih terjadi penangkapan ikan dengan alat/bahan terlarang.
- Pada bulan pertama awal musim hujan terjadi penangkapan ikan secara besar-besaran untuk dikonsumsi, serta penangkapan induk ikan yang akan memijah.
- Lemahnya tingkat ketrampilan dan permodalan.

e. Permasalahan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan

Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar terutama budidaya kolam air tawar, minapadi, budidaya keramba dan jala apung.

- Penyediaan dan penyaluran benih yang bermutu belum berjalan dengan baik.
- Sarana produksi terutama pakan, obat-obatan masih sulit didapat.
- Usaha yang dikerjakan masih tradisional.
- Lemahnya tingkat ketrampilan dan permodalan.

f. Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Pengembangan perikanan yang berwawasan lingkungan mutlak harus dilaksanakan. Gangguan terhadap kelestarian sumberdaya hayati perikanan dan lingkungan hidup akan mempengaruhi usaha peningkatan produksi. Situasi/keadaan sekarang menunjukkan di perairan umum, mutu lingkungan menurun akibat terjadinya pendangkalan, gulma air, cara penangkapan yang merusak, serta terjadinya pencemaran.

g. Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembinaan pasca panen dan pemasaran antara lain :

- Pola produksi nelayan/petani ikan belum berorientasi pada pasar, hal ini disebabkan karena informasi pasar yang masih kurang.
- Penanganan dan pengelolaan pasca panen masih belum dilaksanakan sesuai dengan yang dianjurkan/permintaan pasar.
- Tataniaga/pemasaran ikan masih lemah dan rantai pemasaran masih panjang.

h. Pembinaan Gizi Masyarakat.

Terpenuhinya kebutuhan protein hewan mutlak diperlukan dalam upaya menciptakan manusia yang berkualitas (sehat, kuat, dan cerdas). Permasalahan yang dihadapi sehubungan gizi masyarakat adalah :

- Masih banyak masyarakat belum menyadari bahwa protein yang berasal dari ikan sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan didalam tubuh terutama penduduk didaerah daratan/pegunungan.
- Penyebaran produksi tidak merata kedaerah pedalaman/terpencil
- Belum banyak yang dikembangkan dalam diversifikasi menu ikan.
- Kemampuan daya beli masyarakat belum merata.

i. Kelembagaan

Keberhasilan pembangunan salah satunya ditentukan oleh kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain :

- Aparatur pelayanan/penyuluhan baik secara kualitas dan kuantitas masih kurang.
- Penyempurnaan tata hubungan kerja baik secara vertikal maupun horisontal.
- Pola pengembangan usaha perikanan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan.
- KUB masih belum berperan, baik dalam peningkatan produksi, pemasaran, penyaluran dan pengembalian kredit.
- Keterampilan dan modal, khusus untuk kelompok tani/nelayan masih perlu ditingkatkan.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026, maka disusunlah rencana strategis di tingkat PD. Ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tiga tahun tersebut yang relevan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Barito Timur. Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan dinas teknis yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan dan Pertanian sub sektor Peternakan serta mempunyai Visi dan Misi sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Barito Timur, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2008-2028. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur mendukung arah kebijakan Kabupaten Barito Timur dalam hal **“Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”** Melalui peningkatan pendapatan dari proses pengolahan sumberdaya alam unggulan salah satunya pada subsector perikanan tangkap dan budidaya, sub sector peternakan komoditi ternak kecil dan unggas. Tujuan pembangunan perikanan dan peternakan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Perikanan dan Peternakan
2. Menjaga ketersediaan bahan pangan asal ikan dan ternak secara berkesinambungan
3. Meningkatkan konsumsi terhadap hasil perikanan dan peternakan
4. Meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur Dinas Perikanan dan Peternakan

4.2. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
3. Meningkatnya produksi peternakan
4. Mengawasi sumberdaya kelautan perikanan
5. Mengendalikan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
6. Meningkatkan konsumsi terhadap hasil perikanan dan peternakan
7. Meningkatnya kualitas dan etos kerja aparatur Dinas Perikanan dan Peternakan

Adapun target dan indikator dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 – 2026 lebih rinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Bidang Perikanan dan Peternakan Periode 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada tahun		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perikanan dan Peternakan	1.1 Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2130,21	2162,16	2194,59
		1.2 Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (Ton)	1601,09	1633,11	1665,78
		1.3 Meningkatnya produksi peternakan	- Jumlah Produksi Daging (Ton)	881,09	898,71	916,69
			- Jumlah Produksi Telur (Kg)	521167,14	531590,49	542222,30
2	Menjaga ketersediaan pangan asal ikan dan ternak secara berkesinambungan	Mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Tingkat Pertumbuhan Stock Sumberdaya Perikanan (%)	65	70	75
		Mengendali kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	100	100	100
3	Meningkatkan konsumsi hasil perikanan dan peternakan melalui peningkatan SDM petani dan nelayan pengolah dan pemasar yang berdaya saing	Meningkatnya konsumsi terhadap hasil perikanan	Konsumsi Ikan (%)	98	97,3	96,6
4	Meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur Dinas Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya kualitas pelayanan, dan kemampuan manajemen aparatur Dinas Perikanan dan Peternakan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Poin)	80	80	80

BAB ~ V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, disebutkan bahwa :

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan/atau isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur 2008-2028 yang bertujuan memiliki Visi untuk mewujudkan Barito Timur yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertakwa. Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, dipadukan dengan Misi RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan.

Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan produksi perikanan tangkap

Strategi :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap meliputi :
 - Pemberian bantuan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan <3 GT beserta mesin

- Pemberian bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan bagi nelayan
- Penyediaan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan perairan darat lainnya.
- b. Pengembangan kapasitas nelayan kecil
- c. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
- d. Fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha dan Pemberian asuransi bagi nelayan kecil
- e. Memaksimalkan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Perikanan.
- f. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Kabupaten Barito Timur.
- g. Pendaftaran dan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Kabupaten Barito Timur.

2. Tujuan : Meningkatkan produksi perikanan budidaya

Strategi :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya (pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil)
 - Penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar
 - Penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan hias tawar
 - Penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan komoditas lokal
 - Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat
 - Pembangunan/Rehab dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan ikan terpadu (Posikandu)
 - Pembangunan/Rehab saluran irigasi perikanan
 - Pengembangan jalan produksi
 - Penyediaan sarana dan prasarana produksi pakan mandiri.
- b. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil
- d. Fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha dan asuransi pembudidaya ikan kecil
- e. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil.
- f. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
- g. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Kabupaten Barito Timur.

3. Tujuan : Meningkatkan produksi peternakan

Strategi :

- a. Pengadaan benih/bibit ternak yang bersumber dari daerah/kabupaten lain
- b. Pengadaan hijauan pakan ternak yang bersumber dari daerah/kabupaten lain
- c. Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil
- d. Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak.
- e. Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan
- f. Penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan
- g. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.

4. Tujuan : Menjaga ketersediaan pangan asal ikan dan ternak secara berkesinambungan

Strategi :

- a. Pengelolaan dan pengawasan sumber daya perairan umum darat.
- b. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- c. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk peternakan.
- d. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- e. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan di Kabupaten Barito Timur.
- f. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
- g. Pengujian mutu benih dan bibit ternak
- h. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak
- i. Penjaminan peredaran HPT, bahan pakan/pakan
- j. Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- k. Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan

5. Tujuan : Meningkatkan konsumsi terhadap hasil perikanan dan peternakan

Strategi :

- a. Penyediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- b. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Barito Timur
- c. Penyediaan ternak untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

6. Tujuan : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi perikanan dan peternakan

Strategi :

- a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan :
 - Rehabilitasi pasar ikan dan peternakan
 - Bedah unit pengolahan ikan dan peternakan skala mikro dan kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan)
- b. Pelatihan pengolahan dan pengemasan produk olahan hasil perikanan dan peternakan.

7. Tujuan : Menciptakan keseimbangan ekosistem sumber daya alam untuk mendukung pembangunan perikanan

Strategi :

- a. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Pengawasan usaha perikanan tangkap yang ramah lingkungan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Kabupaten Barito Timur
- b. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Kabupaten Barito Timur

8. Tujuan : Menciptakan keseimbangan ekosistem sumber daya alam untuk mendukung pembangunan peternakan

Strategi :

- a. Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
- b. Pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak
- c. Identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum
- d. Pengelolaan lahan penggembalaan umum
- e. Pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum
- f. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Timur.
- g. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Kabupaten Barito Timur
- h. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten Barito Timur
- i. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner di Kabupaten Barito Timur
- j. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
- k. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

9. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur Dinas Perikanan dan Peternakan

Strategi :

- a. Pelatihan bagi tenaga penyuluh perikanan dan peternakan

BAB ~ VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan Perikanan dan Peternakan merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha perikanan dan peternakan di Kabupaten Barito Timur sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani pelaku usaha perikanan dan peternakan di Kabupaten Barito Timur. Program pembangunan perikanan dan peternakan di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur terdiri ada 7 program (4 program urusan kelautan dan perikanan, 2 program urusan pertanian dan 1 program penunjang), yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program rutin kesekretariatan perkantoran urusan operasional dan pelayanan sebagai pendukung program pembangunan, sehingga hasil yang ingin dicapai dapat lebih optimal. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil perikanan, yang bersumber dari hasil tangkapan nelayan dan masyarakat di perairan umum serta membentuk sikap mental nelayan ataupun masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian kekayaan hayati perikanan di perairan umum. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil perikanan dan pengembangan usaha perikanan disektor budidaya melalui peningkatan atau pembuatan kolam, pembuatan keramba, pemberian bantuan benih dan pakan ikan, peningkatan mutu benih ikan maupun upaya pembinaan kepada para pelaku pembudidaya ikan baik didarat, di sungai maupun di danau. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan untuk menjaga Perairan Perikanan di wilayah Kabupaten Barito Timur dengan sumber daya hayati yang ada agar tetap lestari dan terhindar dari kegiatan eksploitasi ikan yang berlebihan juga illegal fishing. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program ini bertujuan untuk peningkatan atau pengembangan teknologi dan keterampilan memasak ikan masyarakat dan pelaku usaha sehingga tersedianya bahan pangan ikan yang memenuhi standar serta memunculkan jiwa-jiwa wirausaha dibidang usaha pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Penerbitan Tanda daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan terhadap penggunaan sarana pertanian, meningkatkan kualitas Sumberdaya Genetik Hewan, Sapi, Kerbau, mengendali penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta melaksanakan pendistribusian bibit ternak unggas kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan jumlah produksi peternakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- b. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kematian ternak dengan mengurangi kasus penyakit hewan melalui pengamatan, pencegahan dan pengendalian serta untuk peningkatan penyediaan bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan Pemasuk dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penerapan/Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan yang lebih terinci tertuang dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan							Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	
							2024		2025		2026		Target Kinerja	Rp
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		Persen 8017	100 75	7.196.062.560	100	7.558.168.816	100	8.313.985.698	100	23.068.217.074
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	346.813.140	100	381.494.454	100	419.643.899	100	1.147.951.493
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	4	257.123.440	4	282.835.784	4	311.119.362	12	851.078.586
		3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	5	79.689.900	5	87.658.890	5	96.424.779	15	263.773.569
		3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	12	9.999.800	12	10.999.780	12	12.099.758	36	33.099.338
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100	4.373.711.254	100	4.811.082.379	100	5.292.190.617	100	14.476.984.251

3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	53	4.343.240.854	53	4.777.564.939	53	5.255.321.433	159	14.376.127.227
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	30.470.400	12	33.517.440	12	36.869.184	36	100.857.024
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen	100	61.200.000	100	67.320.000	100	74.052.000	100	202.572.000
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	1	61.200.000	1	67.320.000	1	74.052.000	3	202.572.000
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100	515.468.588	100	567.015.447	100	623.716.991	100	1.706.201.026
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Paket	1	95.889.018	1	105.477.920	1	116.025.712	3	317.392.650
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		Paket	1	52.113.400	1	57.324.740	1	63.057.214	3	172.495.354
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	90.174.950	1	99.192.445	1	109.111.690	3	298.479.085
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	15	1.725.000	15	1.897.500	15	2.087.250	45	5.709.750
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12	42.262.500	12	46.488.750	12	51.137.625	36	139.888.875
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	50	233.303.720	50	256.634.092	50	282.297.501	150	772.235.313
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	325.000.000	100	-	100	-	100	325.000.000

3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	1	325.000.000	0	-	0	-	1	325.000.000
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	1.409.932.470	100	1.550.925.717	100	1.706.018.289	100	4.666.876.476
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	17.733.000	12	19.506.300	12	21.456.930	36	58.696.230
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	48	254.699.470	48	280.169.417	48	308.186.359	144	843.055.246
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	1.137.500.000	12	1.251.250.000	12	1.376.375.000	36	3.765.125.000
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	163.937.108	100	180.330.819	100	198.363.901	100	542.631.827
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	23	72.995.108	23	80.294.619	23	88.324.081	69	241.613.807
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	5	49.910.000	5	54.901.000	5	60.391.100	15	165.202.100
3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	2	41.032.000	2	45.135.200	2	49.648.720	6	135.815.920

Terwujudnya peningkatan produktifitas perikanan	Meningkatkan Produktifitas Perikanan sebagai penunjang ketahanan pangan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap		Persen	100	914.501.539	100	1.028.217.931	100	1.155.208.033	100	3.097.927.503
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persen	100	427.351.458	100	492.352.842	100	565.756.436	100	1.485.460.736
		3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		Dokumen	1	34.838.760	1	40.064.574	1	46.074.260	3	120.977.594
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		Unit	35	338.592.798	35	389.381.718	35	447.788.975	105	1.175.763.491
		3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan Tersedia		Unit	300	53.919.900	350	62.906.550	400	71.893.200	1050	188.719.650
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100	487.150.081	100	535.865.089	100	589.451.598	100	1.612.466.768
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Orang	30	327.120.927	30	359.833.020	30	395.816.322	90	1.082.770.268
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kelompok	15	56.132.792	20	61.746.071	25	67.920.678	60	185.799.542
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Unit Usaha	25	103.896.362	35	114.285.998	50	125.714.598	110	343.896.958
	Meningkatkan Produktifitas Perikanan sebagai penunjang ketahanan pangan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya		Persen	100	1.701.405.382	100	2.045.360.112	100	2.457.059.131	100	6.203.824.625
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Capaian Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persen	100	462.762.400	100	510.266.840	100	562.705.954	100	1.535.735.194

3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		Kelompok	15	338.250.000	25	372.075.000	30	409.282.500	70	1.119.607.500
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		Kelompok	20	99.948.400	20	109.943.240	20	120.937.564	60	330.829.204
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kelompok	10	24.564.000	15	28.248.600	20	32.485.890	45	85.298.490
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Capaian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persen	100	1.238.642.982	100	1.535.093.272	100	1.894.353.177	100	4.668.089.431
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1	34.838.761	1	40.064.575	1	46.074.262	3	120.977.598
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Unit	4	506.204.592	5	727.669.105	6	1.004.183.364	15	2.238.057.061
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Unit	2	317.394.210	2	349.133.631	2	384.046.994	6	1.050.574.835
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat		Orang	50	64.615.419	50	71.076.961	50	78.184.657	150	213.877.037
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		Ha	2	22.440.000	2	24.684.000	2	27.152.400	6	74.276.400

		3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.		Orang	100	293.150.000	100	322.465.000	100	354.711.500	300	970.326.500
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Persen	100	459.347.063	100	505.281.769	100	555.809.946	100	1.520.438.779
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya dan Dokumen Hasil Pengawasan Usaha		Dokumen	8 Dokumen	459.347.063	8 Dokumen	505.281.769	8 Dokumen	555.809.946	32 Dokumen	1.520.438.779
		3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Dokumen	4	202.084.496	4	222.292.946	4	244.522.240	12	668.899.682
		3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Dokumen	4	257.262.567	4	282.988.824	4	311.287.706	12	851.539.097
Meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk olahan perikanan dan pemasaran hasil perikanan dengan sasaran peningkatan volume produk olahan perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pengelolaan dan Hasil Perikanan		Persen	100	464.870.137	100	534.600.658	100	614.790.756	100	1.614.261.551
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Capaian Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Persen	100	41.055.000	100	47.213.250	100	54.295.238	100	142.563.488
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Resiko		Dokumen	1	41.055.000	1	47.213.250	1	54.295.238	3	142.563.488

		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha		Unit Usaha	8 Unit Usaha	224.127.020	10 Unit Usaha	257.746.073	12 Unit Usaha	296.407.984	36 Unit Usaha	778.281.077
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko		Unit Usaha	8	224.127.020	10	257.746.073	12	296.407.984	30	778.281.077
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persen	100	199.688.117	100	229.641.335	100	264.087.535	100	693.416.986
		3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahahn Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Ton	#REF!	88.406.250	#REF!	101.667.188	#REF!	116.917.266	#REF!	306.990.703
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		Pelaku Usaha	80	111.281.867	80	127.974.147	80	147.170.269	240	386.426.283
Terwujudnya peningkatan produktifitas peternakan	Meningkatkan Produktifitas Peternakan sebagai penunjang ketahanan pangan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persen	100	1.430.797.757	100	1.573.877.533	100	1.731.265.286	100	4.735.940.575
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Capaian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persen	100	256.985.310	100	282.683.841	100	310.952.225	100	850.621.376
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Laporan	1	256.985.310	1	282.683.841	1	310.952.225	3	850.621.376

3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota		Persen	100	228.576.875	100	251.434.563	100	276.578.019	100	756.589.456
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman Sapi/Kerbau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Dokumen	1	228.576.875	1	251.434.563	1	276.578.019	3	756.589.456
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persen	100	461.802.022	100	507.982.224	100	558.780.447	100	1.528.564.693
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia		Ton	1,2	461.802.022	1,4	507.982.224	1,5	558.780.447	4	1.528.564.693
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain	Persentase Capaian Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain		Persen	100	483.433.550	100	531.776.905	100	584.954.596	100	1.600.165.051
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten Kota/Lain		Ekor	85	483.433.550	90	531.776.905	100	584.954.596	275	1.600.165.051
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persen	100	2.656.918.000	100	2.922.609.800	100	3.214.870.780	100	8.794.398.580
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian		Persen	100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	300	662.000.000
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Laporan	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian		Persen	100	2.456.918.000	100	2.702.609.800	100	2.972.870.780	300	8.132.398.580
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		Unit	1	2.456.918.000	1	2.702.609.800	1	2.972.870.780	3	8.132.398.580

Meningkatkan status kesehatan hewan dan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persen	100	534.909.895	100	588.400.885	100	647.240.973	100	1.770.551.752
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100	368.199.065	100	405.018.972	100	445.520.869	100	1.218.738.905
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Laporan	1	368.199.065	1	405.018.972	1	445.520.869	3	1.218.738.905
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100	126.378.950	100	139.016.845	100	152.918.530	100	418.314.325
		3.27.04.2.02.02	Pengawasan dan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atau Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Laporan	1	126.378.950	1	139.016.845	1	152.918.530	3	418.314.325
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Capaian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persen	100	40.331.880	100	44.365.068	100	48.801.575	100	133.498.523
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Laporan	1	40.331.880	1	44.365.068	1	48.801.575	3	133.498.523
			J U M L A H					15.358.812.333		16.756.517.503		18.690.230.603		50.805.560.440

BAB ~ VIII

P E N U T U P

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas sector perikanan dan peternakan, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani pada umumnya dan petani ikan dan peternak khususnya melalui ekonomi kerakyatan.

Dengan adanya Rencana Strategis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program / kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten / kota serta para stakeholder sebagai upaya untuk mencapai Visi dan misi Pengembangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 menuju masyarakat Barito Timur Jari Janang Kalalawah.